

Eksistensi Kepala Daerah Perempuan Terhadap Performa Ekonomi Daerah Di Indonesia

Muhammad Bagus Sistriatmaja^{a,*}, Bhimo Rizky Samudro^b, Dwi Prasetyani^c

^{a,b,c}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

*sistriatmaja@gmail.com

Abstract

This study aims to look at the existence of women as regional heads and their performance in the economic dimension. The descriptive method is employed to investigate the pattern using district/city regional data in Indonesia from 2015-2018. The data consist of economic dimensions using Gross Regional Domestic Income (GRDP) and Unemployment. The results of the study indicate that the existence of women in leading executive institutions is on average able to improve economic performance based on the GRDP indicator; but on the other hand on average it has not been able to solve the unemployment problem.

Keywords: Gender; Women; Gross Regional Income; Unemployment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat eksistensi perempuan menjadi kepala daerah dan kinerjanya dalam dimensi ekonomi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan data daerah Kabupaten/Kota di Indonesia dari tahun 2015-2018. Data yang digunakan untuk melihat pola dimensi ekonomi menggunakan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi perempuan dalam memimpin lembaga eksekutif secara rerata mampu meningkatkan performa ekonomi dari indikator PDRB; namun di sisi lain secara rerata belum dapat menyelesaikan masalah pengangguran

Kata Kunci: Gender; Perempuan; Pendapatan Regional Bruto; Pengangguran

1. PENDAHULUAN

Gender adalah perbedaan jenis kelamin berdasarkan budaya, di mana laki-laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing yang dikonstruksikan oleh kultur setempat yang berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan, dan posisi dalam masyarakat tersebut. Seks atau jenis kelamin merupakan perbedaan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan ciri biologisnya. Manusia yang berjenis kelamin laki-laki adalah manusia yang bercirikan memiliki penis, memiliki jakala (kala menjing), dan memproduksi sperma. Perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan memiliki alat menyusui (Fakih, 2008). Perbedaan laki-laki dengan perempuan berdasarkan sex atau jenis kelamin merupakan suatu kodrat atau ketentuan dari Tuhan. Ciri-ciri biologis yang melekat pada masing-masing jenis kelamin tidak dapat dipertukarkan. Alat-alat yang dimiliki laki-laki maupun perempuan tidak akan pernah berubah atau bersifat permanen.

Dalam konsep gender, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan berdasarkan konstruksi secara sosial maupun budaya. Perilaku yang menjadi identitas laki-laki maupun perempuan dibentuk melalui proses sosial dan budaya yang telah diperkenalkan sejak lahir. Ketika terlahir bayi laki-laki maka orang tua akan mengecat kamar bayi dengan warna biru, dihiasi dengan Gambar mobil-mobilan dan pesawat, serta memberikannya mainan seperti bola, robot-robotan, dan tamia. Apabila terlahir bayi perempuan maka orang tua akan mengecat kamar bayinya dengan warna merah jambu, menghiasinya dengan Gambar hello kitty, dan menyiapkan boneka-boneka lucu untuk putrinya. Watak sosial budaya selalu mengalami perubahan dalam sejarah, gender juga berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain. Sementara jenis kelamin sebagai kodrat Tuhan tidak mengalami perubahan dengan konsekuensi-konsekuensi logisnya (Muawanah, 2009)

Gender adalah semua atribut social mengenai laki-laki dan perempuan, misalnya laki-laki di gambarkan mempunyai sifat

maskulin seperti keras, kuat, rasional, gagah. Sementara perempuan di gambarkan memiliki sifat feminin seperti halus, lemah, perasa, sopan, penakut. Perbedaan tersebut dipelajari dari keluarga, teman, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan dan kebudayaan, sekolah, tempat kerja, periklanan dan media. Masyarakat menentukan dan membentuk sifat-sifat individu, yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, dan kepribadian. Jika ia seorang laki-laki maka ia harus terlihat maskulin dan apabila ia perempuan maka ia harus feminim. Maskulinitas seorang laki-laki ditunjukkan dengan karakter yang gagah berani, kuat, tangguh, pantang menyerah, egois, dan berpikir rasional. Apabila sifat-sifat tersebut banyak ditinggalkan atau bahkan tidak dimiliki oleh seorang laki-laki, maka ia akan dianggap sebagai laki-laki yang kebancian. Femininitas seorang perempuan ditunjukkan dengan karakter yang lembut, rendah hati, anggun, suka mengalah, keibuan, lemah, dan dapat memahami kondisi orang lain. Apabila sifat-sifat positif ini banyak ditinggalkan oleh seorang perempuan, atau bahkan tidak dimilikinya, maka wanita yang bersangkutan dikatakan sebagai wanita yang tidak menarik (Fakih, 2008). Perempuan merupakan perbincangan yang sangat menarik dan hangat di seluruh dunia, bukan saja karena sisi perempuan tersebut, melainkan fenomena-fenomena yang selalu menjadi titik perbincangan menarik ditengah berkembangnya isu patriarki.

Pada zaman sekarang perhatian terhadap pembangunan berbasis gender semakin besar untuk dapat mengurangi adanya diskriminasi gender yang terjadi di hampir seluruh dunia. Ketidakadilan gender merupakan akibat atas adanya konstruk dari sistem sosial masyarakat yang salah satu dari gender tersebut menjadi korban baik laki-laki maupun perempuan. Akibat pembelajaran dari kehidupan sebelumnya, perempuan lebih dirugikan daripada laki-laki yang berakibat terhadap kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan yang terjadi hampir di semua aspek kehidupan.

Tabel 1 Indeks Pembangunan Gender Indonesia Tahun 2010-2018

Tahun	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender
2010	89.42	68.15
2011	89.52	69.14
2012	90.07	70.07
2013	90.19	70.46

Tahun	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender
2014	90.34	70.68
2015	91.03	70.83
2016	90.82	71.39
2017	90.96	71.74
2018	90.99	72.1

Sumber: Badan Pusat Statistika (2018)

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa Indonesia telah mencapai pada tingkatan indeks pembangunan gender pada tahun 2018 yaitu 90.99 yang memiliki arti bahwa masih terdapat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal pembangunan walaupun tidak terlalu mencolok. Sedangkan pada 2018 Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia mencapai 72.1 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemberdayaan perempuan dalam dunia politik dan ekonomi masih jauh dari harapan.

Tabel 2 Indeks Pembangunan Manusia menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2019

Tahun	Laki-laki	Perempuan
2014	73.36	66.27
2015	73.58	66.98
2016	74.26	67.44
2017	74.85	68.08
2018	75.43	68.63
2019	75.96	69.18

Sumber: Badan Pusat Statistika (2019)

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa indeks pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan masih ada ketimpangan. Pada tahun 2019 jenis kelamin laki-laki mencapai 75.96 atau mendapatkan kategori IPM dengan status tinggi. Namun, dilain sisi pada jenis kelamin perempuan masih berada pada kategori status sedang yaitu 69.18.

Perempuan tidak hanya memiliki peran domestik untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga, perempuan juga sebagai penggerak roda pembangunan. Secara internal, kaum perempuan merupakan tiang keluarga yang juga sebagai penentu kualitas generasi penerus bangsa. Peran perempuan dalam pembangunan tidaklah diragukan. Isukesetaraan gender di Indonesia tertuang dalam visi pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025, untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan

makmur. Adil berarti tidak ada pembatasan gender. Penghapusan diskriminasi gender di semua bidang kemudian menjadi isu yang terus menerus dibahas sebagai target pembangunan.

Menurut UUD 1945 pasal 28. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Dimana dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Undang-undang tersebut merupakan cerminan dari negara demokrasi yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk berkiprah, termasuk perempuan. Namun, pelabelan warga kelas dua terhadap perempuan dalam ranah publik bukanlah menjadi hal yang baru. Konsep demokrasi yang mengusung semangat egalitarian hanya berlaku pada laki-laki saja. Membatasi kaum perempuan dari berbagai aktivitas kehidupan kenegaraan adalah melemahkan politik gender dan menafikan kekuatan politik perempuan. Ini adalah bentuk diskriminasi dan ketidakadilan politik gender yang terjadi di Indonesia selama masa konflik atau sebelum masa reformasi. Rendahnya persentase perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan negara itu juga bukti yang sangat signifikan yang disebabkan oleh suatu lembaga. Akibatnya dari rezim orde baru (ORBA) dengan format politik yang otoriter menyebabkan terbatasnya kesempatan partisipasi perempuan dalam kehidupan politik Indonesia terhalangi. Format politik terlihat menghacurkan politik gender seluruh wilayah negara republik Indonesia (Rasyidin & Fidhia Aruni, 2016).

Sesungguhnya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan (Fakih, 2008). Ketidaksetaraan gender juga disebabkan oleh adanya sikap bias gender yang didasarkan pengetahuan-pengetahuan masyarakat yang memiliki kecenderungan bersifat tidak adil gender. Kultur sosial budaya yang ada menempatkan perempuan pada kelas kedua, perempuan lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Budaya hegemoni patriarki menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga, organisasi, maupun politik, sehingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah. Kurangnya kesempatan yang dimiliki perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan atau bahkan menjadi

pemimpin dari suatu organisasi, membuat perempuan lebih memilih bersikap pasif.

Permasalahan ketidakadilan gender masih terjadi dalam setiap pengambilan keputusan, kepengurusan, maupun kepemimpinan dalam pemerintah daerah. Pengaruh budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pengurus dan penanggung jawab dalam pekerjaan domestik, membuat perempuan dalam organisasi cenderung ditunjuk sebagai sie konsumsi, bendahara, sekretaris, dan posisi lain yang mengacu pada sektor domestik. Kebijakan-kebijakan ini tentu dapat melanggengkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat yang menganut hegemoni patriarki. Seiring dengan perkembangan masyarakat yang memperjuangkan kesetaraan gender, beberapa peran yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan telah dipertukarkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan cukup banyaknya kaum perempuan yang berani memasuki area maskulinitas dan berani tampil di sektor publik. Tidak jarang pula kaum pria yang ikut mengerjakan tugas perempuan di sektor domestik. Sejalan dengan pengarusutamaan gender, telah ada perempuan yang mendalami ilmu permesinan dengan menjadi mahasiswa jurusan teknik mesin meski pun masih dianggap tabu oleh kultur setempat, dan mereka merupakan kelompok minoritas dari total keseluruhan mahasiswa di jurusan tersebut.

Tabel 3 Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2010-2018

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen
2010	17.49
2011	17.49
2012	18.04
2013	18.04
2014	17.32
2015	17.32
2016	17.32
2017	17.32
2018	17.32

Sumber: Badan Pusat Statistika (2018)

Pada Tabel 3 dapat dilihat masih kurangnya keterlibatan perempuan di parlemen. Tahun 2010 hingga 2018 keterlibatan perempuan di parlemen fluktuatif dari tahun ketahun. Keterlibatan parlementer besar adalah pada tahun 2012 dan 2013 yaitu sebesar 18.04 persen. Sedangkan dari tahun 2014 hingga 2018 turun menjadisebesar 17.32 persen, hal tersebut membuktikan bahwa masih ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di bidang politik.

Penelitian oleh (Araujo & Romero, 2016) menunjukkan bahwa peran perempuan

sebagai pemimpin pada daerah berpengaruh positif terhadap tingkat transparansi anggaran dan informasi. Selanjutnya penelitian (Priebe, 2017) menunjukkan hal yang sama. Pada periode kepemimpinan perempuan penyampaian pelayanan publik lebih baik selain adanya pemberdayaan dan partisipasi perempuan yang meningkat. Selanjutnya penelitian oleh (Deininger *et al.*, 2020) menyatakan bahwa kepemimpinan Desa yang dipegang oleh perempuan meningkatkan aktivitas ekonomi dengan berkurangnya pengangguran. Selain itu meningkatkan keterlibatan perempuan juga dalam bidang ekonomi dan sosial.

Kepimpinan perempuan pada suatu daerah mengakibatkan lebih banyaknya alokasi anggaran untuk dimanfaatkan kedalam instrument kebijakan yang telah direncanakan (Funk & Philipps, 2018). Walaupun menggunakan lebih banyak alokasi anggaran. Dalam penelitian (Barnes & Beaulieu, 2014) yang kemudian diperbaharui lagi oleh (Barnes & Beaulieu, 2018) mengungkapkan bahwa perempuan cenderung menghindari risiko yang besar seperti korupsi, selain itu perempuan dalam penelitiannya juga lebih jujur daripada laki-laki.

Berdasarkan latar belakang maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul, "Kajian Eksistensi Perempuan sebagai Pemimpin Daerah terhadap Performa Sosial Ekonomi".

2. Kajian Literatur

2.1 Ekonomi Politik

Ekonomi politik adalah salah satu pendekatan di ilmu ekonomi yang mempercayai bahwa struktur kekuasaan akan mempengaruhi pencapaian ekonomi seseorang (Yustika, 2009). Sedangkan menurut Caporaso & Levine (1993) dalam (Deliarnov, 2006) ekonomi politik pada awalnya adalah media pemberi saran bagi pengelolaan masalah-masalah ekonomi kepada para penyelenggara negara. Namun, oleh para pakar ekonomi politik baru, ekonomi politik lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik. Deliarnov juga menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi tidak terlepas dari konteks politik. Sistem politik tidak hanya membentuk hubungan kekuasaan dalam masyarakat, tetapi juga menentukan nilai-nilai serta norma-norma yang dapat menentukan apa dan bagaimana berabagai kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat.

2.2 Kesetaraan Gender

Menurut (Sastriyani & Sugihastuti, 2007) Kesetaraan gender adalah kesamaan perolehan kesempatan dan hasil untuk perempuan dan laki-laki, termasuk penghapusan diskriminasi dan ketidaksetaraan

struktural dalam mengakses sumber daya, kesempatan dan jasa-jasa, seperti akses yang sama untuk kesehatan, pendidikan, sumber daya produktif, partisipasi sosial dan ekonomi. Memfokuskan kesetaraan gender sebagai sasaran pembangunan berarti mengakui bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya, sistem politik serta lembaga berdasarkan gender dan analisis status ketidaksetaraan perempuan yang dilakukan secara sistematis dengan memperhitungkan perbedaan ras, etnik, kelas dan ketidakmampuan.

2.3 Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan dalam lingkup kabupaten atau kota adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah dalam satu tahun tertentu. PDRB dihitung berdasarkan harga konstan dan atas harga berlaku. PDRB atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun dasar. Sedangkan, PDRB atas harga berlaku menggambarkan nilai-nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tersebut (Sukwiyat *et al.*, 2006).

Sedangkan pengertian dari Bank Indonesia, PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB sendiri dibedakan menjadi PDRB atas harga konstan dan atas dasar harga berlaku.

2.4 Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan (Kaufaman & Hotchkiss, 1999). Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut (Sukirno, 1994).

Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang

menggambarkan fenomena dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti (Indiarto & Supomo, 2002). Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan yang sedang dihadapi (Notoatmojo, 2002)

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang berjudul Kajian Eksistensi Perempuan sebagai Pemimpin Daerah terhadap Performa Ekonomi ini dilakukan untuk melihat bagaimana perempuan dapat terpilih sebagai pemimpin daerah dan performa ekonominya selama menjabat sebagai pemimpin yang dilakukan di Indonesia pada tahun 2015-2019. Periode penelitian adalah dari tahun 2015-2019. Pemilihan periode penelitian karena bersamaan dengan diadakannya pilkada serentak di Indonesia.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini berupa data pengangguran, dan PDRB di 47 Kabupaten dan Kota di Indonesia yang dipimpin oleh pemimpin daerah seorang perempuan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi pustaka dan beberapa data dari Badan Pusat Statistika Indonesia.

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1. Analisis Isi (Content Analysis)

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (content analysis). Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditiru (*replicable*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi dan isi dari komunikasi tersebut (Bungin, 2008). Berelson (1959), dalam (Bungin, 2008) mengatakan bahwa teknik analisis isi merupakan teknik yang bersisi ganda. Analisis tersebut dapat digunakan pada teknik kuantitatif maupun kualitatif, tergantung pada sisi mana peneliti memanfaatkannya. Dalam penelitian kualitatif, analisis isi ditekankan pada bagaimana peneliti melihat kesamaan isi komunikasi secara kualitatif, memaknai isi komunikasi, melihat simbol-simbol, dan memaknai isi saat interaksi

simbolis yang terjadi dalam komunikasi. Dalam penelitian kualitatif, penggunaan analisis isi lebih banyak ditekankan pada bagaimana simbol-simbol yang ada pada komunikasi itu terlihat dalam interaksi sosial, dan bagaimana simbol-simbol itu terlihat dan dapat dianalisis oleh peneliti. Peneliti yang mampu menggunakan ketajaman analisisnya untuk merajut fenomena isi komunikasi menjadi fenomena sosial yang terbaca oleh orang pada umumnya diperlukan dalam analisis isi ini. Oleh karena itu, pemahaman dasar terhadap kultur di mana komunikasi itu terjadi menjadi sangat penting. Kultur menjadi muara yang luas terhadap berbagai macam bentuk komunikasi di masyarakat (Bungin, 2008). Deskripsi yang diberikan para ahli sejak Janis (1949), Berelson (1952) sampai Lindzey & Aronson (1968) yang dikutip oleh (Muhadjir, 1996) mengatakan bahwa terdapat tiga syarat analisis isi, yaitu; obyektivitas, pendekatan sistematis, dan generalisasi. Analisis harus berlandaskan aturan yang dirumuskan secara eksplisit. Untuk memenuhi syarat sistematis, untuk kategorisasi isi harus menggunakan kriteria tertentu.

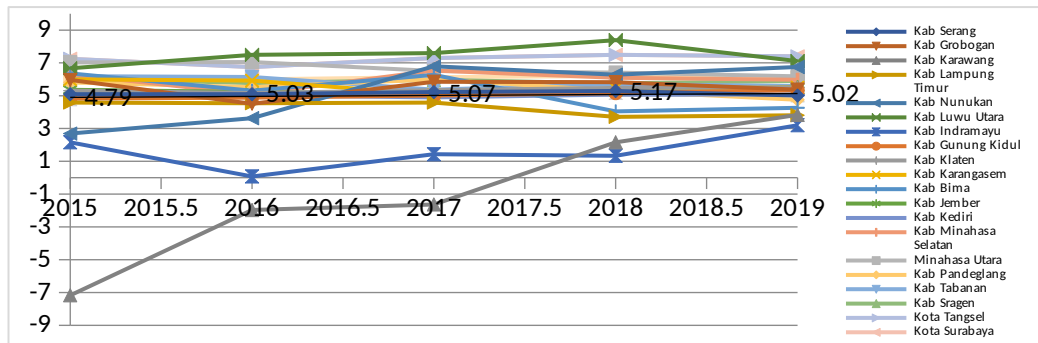
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Performa Ekonomi Perempuan sebagai Pemimpin Daerah

4.1.1 Indikator PDRB

4.1.1.1 Perempuan Terpilih Tahun 2015

Pada Gambar 1 dapat dilihat terdapat 23 Kabupaten dan Kota yang penyelenggarannya dimenangkan oleh perempuan. Grafik diatas dapat menunjukkan bahwa sebagian besar capaian pertumbuhan PDRB dari tahun 2015-2019 berada diatas capaian pemerintah tingkat Nasional. Dari grafik diatas terdapat tiga daerah yang performa pertumbuhan PDRB memiliki performa *trend* dibawah pemerintah pusat yaitu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan besaran -7.17%, -1.97%, -1.63%, 2.16%, dan 3.83%. Selanjutnya Kabupaten Indramayu dengan besaran 2.16%, 0.08%, 1.43%, 1.34%, dan 3.2%. Kabupaten Lampung Timur juga memiliki trend pertumbuhan PDRB dibawah capaian pemerintah Pusat yaitu dengan besaran 4.58%, 4.54%, 4.58%, 3.71%, 3.81%.



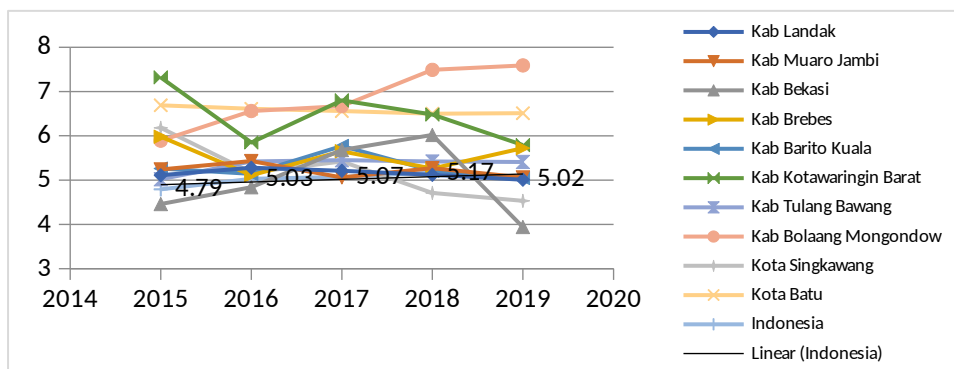
Gambar 1. Grafik Pertumbuhan PDRB Pemimpin Perempuan Terpilih Tahun 2015
 Sumber: Badan Pusat Statistika, diolah (2021)

Performa para pemimpin kepala daerah perempuan dengan capaiannya melebihi capaian dari pemerintah tingkat pusat dapat menjadi salah satu indikator bahwa pemimpin kepala daerah perempuan dapat mencapai capaian terkait dengan indikator PDRB ketingkat yang baik pula. *Trend* yang dapat dilihat dari grafik tersebut juga menegaskan bahwa dibawah kepemimpinan perempuan beberapa daerah dapat meningkatkan PDRB daerahnya. Terkait masih adanya daerah yang memiliki *trend* dibawah capaian pemerintah pusat sudah semestinya untuk dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan guna peningkatan

pada indikator PDRB dapat lebih maksimal.

4.1.1.2 Pemimpin Perempuan Terpilih Tahun 2017

Pada Gambar 2 dapat dilihat garis *trend* pertumbuhan PDRB 10 Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2017 dimenangkan oleh kontestan perempuan. Pada garis *trend* dapat terlihat bahwa terjadi fluktuasi dari tahun ketahun khususnya pada saat terpilihnya pemimpin perempuan yaitu pada tahun 2017 hingga 2019. Terdapat satu daerah yang selalu berada dibawah capaian pemerintah pusat yaitu Kabupaten Bekasi. Walaupun pada tahun 2018 terjadi kenaikan cukup baik hingga mencapai pada angka 6.02%. Capaian yang menjadi salah satu tolak ukur bagi daerah adalah capaian pemerintah pusat yang dimana pada tahun 2015-2019 berada pada garis *trend* 4.79%, 5.03%, 5.07%, 5.17%, dan 5.02%.



Gambar 2. Grafik Pertumbuhan PDRB Pemimpin Perempuan Terpilih Tahun 2017
 Sumber: Badan Pusat Statistika, diolah (2021)

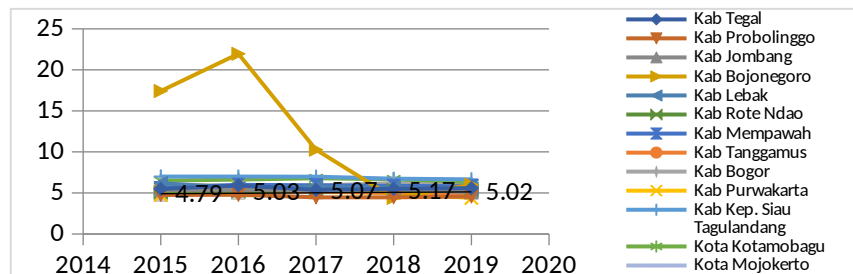
Performa pertumbuhan PDRB pada daerah-daerah yang pada tahun 2017 terpilih pemimpin perempuan mampu melebihi capaian pemerintah pusat. Prestasi yang baik bagi para pemimpin perempuan pada daerahnya masing-masing. Walaupun ada beberapa daerah yang masih mengalami

kurangnya capaian pertumbuhan PDRB jika dibandingkan dengan pemerintah pusat.

4.1.1.3 Pemimpin Perempuan Terpilih Tahun 2018

Pada Gambar 3 dapat dilihat performa pertumbuhan PDRB dari daerah yang pada pilkada tahun 2018 terpilih kontestan pemimpin perempuan. Performa cenderung mengalami fluktuasi dimasing-masing daerah. Satu daerah yang terlihat menonjol pada grafik tersebut adalah Kabupaten Bojonegoro yang mampu mencapai angka melambung tinggi dari

capaian pemerintah pusat pada besaran angka 4.79%, 5.03%, 5.07%, 5.17%, 5.02%. Kabupaten Bojonegoro mampu mencapai besaran angka pertumbuhan PDRB pada titik 21.95% pada tahun 2016. walaupun pada saat pemimpin perempuan terpilih tahun 2018 hanya mampu mencapai pada angka 4.41% dan 6%



Gambar 3. Grafik Pertumbuhan PDRB Pemimpin Perempuan Terpilih Tahun 2018
Sumber: Badan Pusat Statistika, diolah (2021)

Performa para pemimpin kepala daerah perempuan dengan capaiannya melebihi capaian dari pemerintah tingkat pusat dapat menjadi salah satu indikator bahwa pemimpin kepala daerah perempuan dapat mencapai capaian terkait dengan indikator PDRB ketingkat yang baik pula. *Trend* yang dapat dilihat dari grafik tersebut juga menegaskan bahwa dibawah kepemimpinan perempuan beberapa daerah dapat meningkatkan PDRB daerahnya. Terkait masih adanya daerah yang memiliki *trend* dibawah capaian pemerintah pusat sudah semestinya untuk dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan guna peningkatan pada indikator PDRB dapat lebih maksimal. Peningkatan PDRB dapat terjadi apabila kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tepat. Keputusan yang dibuat dalam menerapkan suatu kebijakan berkaitan dengan prinsip kontradiksi, kontradiksi yang terkait dengan pola transformasi sosioekonomi sebagai hasil dari perubahan kelembagaan yang dominan (O'Hara, 2008 dalam Samudro, 2010)

PDRB pada daerah Kabupaten dan Kota yang dipimpin oleh perempuan dimulai pada tahun 2015 atau sejak pertama kali dimulainya pilkada serentak pada daerah cenderung selalu mengalami kenaikan dari tahun terpilih hingga pada tahun 2019. Indeks PDRB capaian Nasional menjadi acuan apakah daerah Kabupaten dan Kota tersebut memiliki performa PDRB yang tinggi atau rendah.

Tabel 4. Jumlah Daerah dalam Kategori PDRB Tinggi dan Rendah

Tahun	Tinggi	Rendah
2015	18	5
2017	9	1
2018	10	4
Jumlah	37	10

Keterangan: *Berdasarkan Indeks PDRB Nasional

Pada Tabel 4 dapat dilihat dimulai pada tahun 2015 terdapat 18 daerah yang mampu mencapai tingkat PDRB ketingkat tinggi dan hanya menyisakan 5 daerah saja yang masih rendah atau berada dibawah capaian Nasional. Selanjutnya pada daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2017 dan dimenangkan oleh kontestan perempuan menghasilkan 9 daerah Kabupaten dan Kota yang mampu mencapai PDRB pada capaian lebih tinggi dari pada capaian Nasional dan hanya menyisakan 1 daerah saja yang dibawah capaian Nasional. Terakhir pada daerah yang menyelenggarakan pilkada

4.1.1.4 Jumlah Daerah dalam Kategori PDRB Tinggi dan Rendah

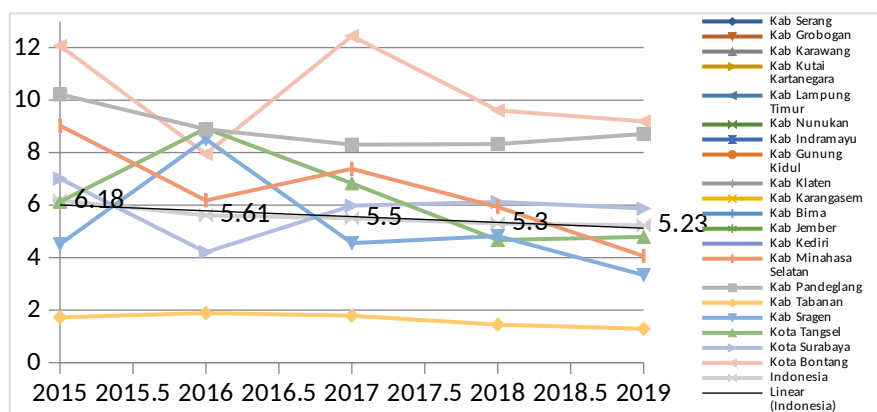
serentak pada tahun 2018 terdapat 10 daerah yang mampu mencapai tingkat PDRB diatas capaian Nasional dan hanya menyisakan 4 daerah pada tingkat PDRB dibawah capaian Nasional.

Performa daerah Kabupaten dan Kota yang mampu menghasilkan capaian PDRB ketingkat yang lebih tinggi dari pada capaian Nasional mengindikasikan bahwa dibawah kepemimpinan perempuan daerah Kabupaten dan Kota juga mampu untuk dapat menghasilkan kebijakan yang berdampak pada peningkatan PDRB dimasing-masing daerah. Total berjumlah 37 daerah pada tahun 2015, 2017, dan 2018 daerah Kabupaten dan Kota yang mampu mencapai tingkat PDRB ketingkat yang lebih tinggi daripada nasional dan menyisakan 10 daerah berada pada capaian PDRB dibawah capaian Nasional. Peningkatan PDRB dapat terjadi apabila kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tepat. Peningkatan investasi pada suatu daerah Kabupaten dan Kota menjadi salah satu kebijakan untuk dapat meningkatkan PDRB (Maharani, 2016)

4.1.2 Indikator Pengangguran

4.1.2.1 Pemimpin Perempuan Terpilih Tahun 2015

Pada Gambar 4 dapat dilihat *trend* tingkat pengangguran terbuka pada 23 daerah Kabupaten dan Kota yang dimana pemimpinnya merupakan perempuan. Pada Gambar tersebut menunjukkan banyaknya varian yang menunjukkan TPT beberapa daerah telah mampu mencapai capaian lebih bagus daripada capaian pemerintahan tingkat pusat yaitu persentasenya menunjukkan lebih kecil daripada *trend* Indonesia pada besaran 6.18%, 5.61%, 5.5%, 5.3%, 5.23%. namun terdapat banyak juga daerah yang dalam hal pencapaiannya masih dibawah pemerintahan tingkat pusat. Yaitu, yang berada diatas garis *trend* Indonesia. Contoh daerah yang berhasil melebihi capaian tingkat pemerintah Pusat adalah Kab Karangasem, Kab Tabanan, dan Kab Gunung Kidul. Untuk daerah yang capaiannya masih dibawah pemerintah pusat adalah Kota Bontang, Kab Karawang, dan Kab Pandeglang.



Gambar 4. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Pemimpin Perempuan Terpilih Tahun 2015
Sumber: Badan Pusat Statistika, diolah (2021)

Terdapat banyak daerah yang capaian TPT telah melebihi capaian pemerintah pusat. Namun, banyak pula yang capaiannya masih lebih tinggi daripada pemerintah pusat atau masih dibawah dari pemerintah pusat. Kebijakan yang diambil oleh para pemimpin perempuan menjadi salah satu penentu bagaimana tingkat pengangguran dapat ditekan pada daerah kepemimpinan masing-masing pemimpin. Penciptaan lapangan pekerjaan yang baik dapat menjadi salah satu indikator yang baik untuk dapat menilai

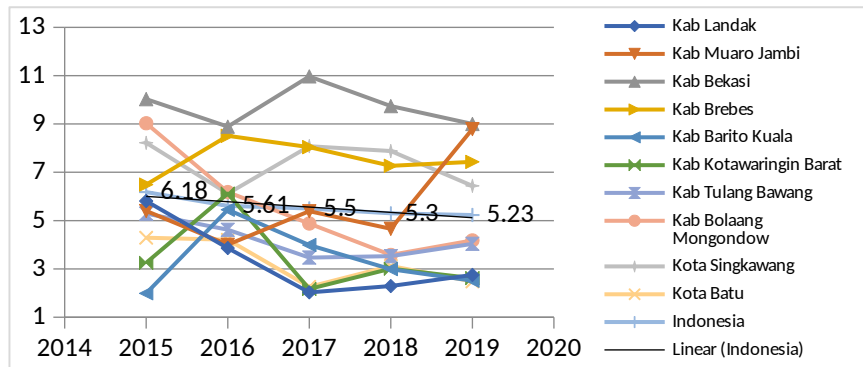
apakah pemimpin tersebut bagus atau tidak. Dalam hal ini beberapa pemimpin perempuan telah mampu untuk dapat menekan pengangguran di daerah kepemimpinannya sehingga capaian TPT nya rendah.

4.1.2.2 Pemimpin Perempuan Terpilih Tahun 2017

Pada Gambar 5 dapat dilihat grafik TPT pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2017 yang dimenangkan oleh kontestan perempuan. Garis *trend* diatas mengalami fluktuasi dari tahun ketahun di masing-masing

daerah. Capaian pemerintah pusat yang sebagai tolak ukur keberhasilan terhadap pemerintah daerah mengalami penurunan dari tahun ketahun dimulai pada tahun 2015 secara berturut mengalami perbaikan dalam hal penurunan tingkat pengangguran dengan besaran 6.18%, 5.61%, 5.5%, 5.3%, dan 5.23%. Kabupaten yang dapat dilihat melalui garis *trend* memiliki performa yang tidak cukup baik adalah Kabupaten Bekasi yang dengan

besaran pada saat terpilihnya pemimpin perempuan tahun 2017 sebesar 10.97%, 9.74%, 9% walaupun secara periodik dari tahun ketahun mengalami penurunan namun besaran tersebut masih jauh diatas capaian dari pemerintah pusat. Selanjutnya Kabupaten Brebes dan Kota Singkawang yang juga masih mencapai garis *trend* diatas capaian pemerintah pusat.



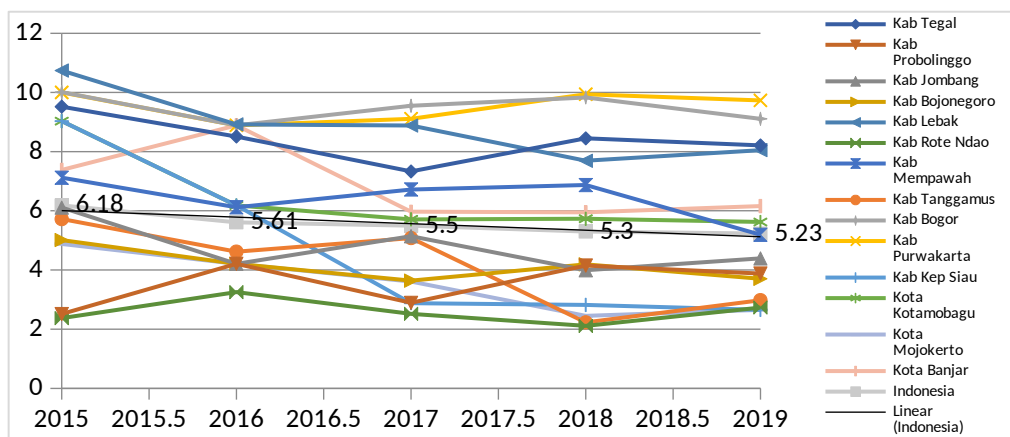
Gambar 5. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Pemimpin Perempuan Terpilih Tahun 2017
 Sumber: Badan Pusat Statistika, diolah (2021)

Keberhasilan pemimpin daerah untuk dapat menurunkan persentase tingkat pengangguran didaerahnya menjadi salah satu prestasi yang sangat baik pada indikator ekonomi. Dengan berkurangnya pengangguran diharapkan ada kontribusi terhadap peningkatan pembangunan yang lebih baik daripada sebelumnya.

pada tahun 2018 yang dimenangkan oleh kontestan perempuan. Pada Gambar tersebut menunjukkan bahwa TPT mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Masih banyak Kabupaten dan Kota yang capaian TPT masih berada diatas capaian pemerintah pusat atau tidak lebih baik dari pada pemerintah pusat yang besaran adalah pada tahun 2018 dan 2019 5.3% dan 5.23%. Contoh daerah yang capaiannya masih diatas pemerintah pusat adalah Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Tegal. Selanjutnya daerah yang sudah melebihi capaian pemerintah pusat adalah Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Mojokerto.

4.1.2.3 Pemimpin Perempuan Terpilih Tahun 2018

Pada Gambar 6 merupakan grafik TPT pada daerah yang menyelenggarakan Pilkada



Gambar 6. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka Pemimpin Perempuan Terpilih Tahun 2018
 Sumber: Badan Pusat Statistika, diolah (2021)

Performa TPT menjadi salah satu indikator ekonomi dimana apabila pada suatu daerah memiliki tingkat pengangguran yang kecil diyakini dapat meningkat pula pembangunan daerah tersebut. Performa baik atau buruk seorang pemimpin juga dapat dilihat dari performa TPT selama pemimpin tersebut memimpin daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki potensi untuk dapat mengurangi tingkat pengangguran baik di Kabupaten maupun Kota. Potensi tersebut adalah adanya bonus demografi, globalisasi yang semakin besar kemajuannya, dan adanya potensi unggulan daerah yang dapat dikelola untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar untuk pembangunan suatu bangsa (Sholeh, 2017)

4.1.2.4 Jumlah Daerah dalam Kategori Pengangguran Tinggi dan Rendah

Pengangguran menjadi salah satu variabel pada indikator ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi akan mengakibatkan pembangunan pada suatu daerah menjadi kurang maksimal. Pada daerah Kabupaten dan Kota yang menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2015, 2017, dan 2018 dan dimenangkan oleh kontestan perempuan dapat dilihat capaian tingkatan tingkat penganggurannya pada kategori rendah atau tinggi dengan menggunakan indeks pengangguran nasional sebagai acuannya.

Tabel 5. Jumlah Daerah dalam Kategori Pengangguran Tinggi dan Rendah

Tahun	Tinggi	Rendah
2015	11	12
2017	6	4
2018	7	7
Jumlah	24	23

Keterangan: *Berdasarkan Indeks Pengangguran Nasional

Pada Tabel 6 dapat dilihat terdapat total 24 daerah yang masih memiliki permasalahan tingginya pengangguran pada daerah tersebut dan tidak berbeda jauh masih terdapat 23 daerah yang sudah mampu mencapai tingkat penganggurannya masuk pada kategori rendah. Total 47 daerah tersebut dibagi menjadi 3 tahun sesuai dengan pelaksanaan pilkada serentak yang menghasilkan perempuan sebagai pemimpinnya. Pada tahun 2015 terdapat total 23 daerah yang pada saat menyelenggarakan pilkada dimenangkan oleh kontestan perempuan dimana masih terdapat 11 daerah yang berada pada kategori pengangguran tinggi dan tidak jauh berbeda terdapat 12 daerah mampu masuk pada kategori daerah dengan pengangguran pada kategori rendah. Selanjutnya pada tahun 2017 terdapat total 10 daerah yang terdiri atas 6 daerah yang masuk pada kategori daerah dengan pengangguran tinggi dan 4 daerah pada kategori rendah. Terakhir pada tahun 2017 terdapat total 14 daerah yang dimana masing-masing terdiri atas 7 daerah pada kategori tingkat pengangguran yang tinggi dan rendah.

Masih banyaknya daerah yang berada pada kategori tingkat pengangguran tinggi menjadi salah satu permasalahan yang penting untuk para pemangku kebijakan khususnya pemimpin daerahnya untuk kedepannya mampu merumuskan kebijakan yang dapat mengurangi pengangguran pada masing-masing daerah. Dengan pengangguran yang rendah maka dapat menghasilkan pembangunan yang semakin baik pada daerah tersebut. Permasalahan yang terjadi terhadap besarnya tingkat pengangguran di Indonesia adalah daya saing tenaga kerja yang relatif masih rendah, rendahnya daya saing disebabkan mutu SDM akibat rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi kerja, selanjutnya pasar tenaga kerja yang besar, dan hubungan industrial antara pemerintah dan industry yang belum baik serta ketidaksesuaian keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan yang dibutuhkan oleh industry (Sholeh, 2017)

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 KESIMPULAN

Daerah yang pada saat penyelenggaraan pilkada serentak dan dimenangkan oleh kontestan perempuan rata memiliki tingkat perubahan PDRB dengan kondisi kausalitas kumulatif yaitu sebanyak 37 daerah. Terdapat 10 daerah yang pada saat kontestan perempuan memenangkan pilkada serentak tingkat perubahan PDRB berada pada kondisi kontradiksi. 8 daerah berada pada kontradiksi

dimana perubahan PDRB lebih tinggi daripada pengangguran. Capaian indikator ekonomi dimana indikator ekonomi terdiri atas PDRB dan pengangguran. Pada daerah yang dipimpin perempuan memiliki tren yang baik dari tahun ketahun Rata-rata capaian performa PDRB berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 37 daerah dan 10 daerah masih berada pada kategori rendah Rata-rata capaian performa pengangguran masih kurang baik dimana masih terdapat 24 daerah dengan berada pada kategori tinggi dan 23 daerah sudah berada pada kategori rendah.

5.2 SARAN

Peningkatan kaderisasi politisi perempuan pada partai politik sehingga mampu meningkatkan angka partisipasi perempuan dalam perhelatan politik. Sosialisasi kepada para perempuan pentingnya ikut berpartisipasi dalam kontestasi politik. Peningkatan fasilitas publik seperti kesehatan dan pendidikan untuk dapat meningkatkan performa IPM bagi daerah-daerah yang masih rendah. Peningkatan penciptaan lapangan pekerjaan bagi daerah yang masih tinggi tingkat penganggurannya.

6. Ucapan Terimakasih

Kepada teman-teman yang berkontribusi pada penulisan ini saya ucapkan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Araujo, & Romero. (2016). Women Political Representation and Transparency in Local Governance. *Local Government Studies*.
- Barnes, & Beaulieu. (2014). Gender Stereotypes and Corruptions: How Candidate Affect Perceptions of Election Fraud. *The Women and Politics Research Section of the American Political Science Association*.
- Barnes, & Beaulieu. (2018). Women Politicians, Institutions, and Perceptions of Corruption. *Sage Journals: Comparative Political Studies*, 1–34.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Prenada Media Group.
- Deininger, Nagarajan, & Singh. (2020). Women Political Leadership and Economic Empowerment: Evidence from Public Works in India. *Elsevier: Journal of Comparative Economics*, 48, 277–201.
- Deliarnov. (2006). *Ekonomi Politik*. Erlangga.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Belajar.
- Funk, & Philipps. (2018). *Representative Budgeting: Women Mayors and The Compositions of Spending in Local Governments*. University of Utah: *Political Research Quarterly*, 1–15.
- Indiarto, N., & Supomo, B. (2002). *Metodologi Penelitian*. BPPFE Yogyakarta.
- Kaufaman, & Hothckiss. (1999). *The Economic Labor Markets*. Georgia State University.
- Maharani, D. (2016). Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sumatera Utara. *Intiqad*, 8(2).
- Muawanah, E. (2009). *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Teras.
- Muhadjir, N. (1996). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin.
- Notoatmojo, S. (2002). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Priebe. (2017). *Political Reservation and Female Empowerment: Evidence from Maharashtra, India*. Oxford Development Studies.
- Rasyidin & Fidhia Aruni . (2016). *GENDER DAN POLITIK; Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Unimasl Press. <https://www.researchgate.net/publication/324594910>
- Samudro, B. R. (2010). *Political Economy of Uneven Regional Development and Local Election in Indonesia*. 10th International Conference Indonesian Regional Science Association.
- Sastriyani, & Sugihastuti. (2007). *Glosarium Seks dan Gender*. Carasvati Books.
- Sholeh, A. (2017). Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomis*, 6(2).
- Sukirno, S. (1994). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Raja Grafindo.
- Sukwiaty, Jamal, S., & Sukamto, S. (2006). *Ekonomi*. Yudhistira.
- Yustika, A. (2009). *Ekonomi Politik, Kajian Teoritis dan Analisis Empiris*. Pustaka Belajar.

